

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



LKjIP 2023



082121206168



pajakdaerah.sidoarjokab.go.id



[bppd.sidoarjo](https://www.youtube.com/bppd.sidoarjo)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KAB. SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 12 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.

Pembina Tingkat I

NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders*, Tanggapan (*feedback*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, 20 Februari 2024

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO

SEKRETARIS



Ditandatangani secara elektronik oleh

SULISTYONO, SE

NIP. 196809111997031004

SULISTYONO, S.E

Pembina Tk. I

NIP. 19680911 199703 1 004

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direview	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Ikhtisar Eksekutif	7
Bab I Pendahuluan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A Rencana Strategis Tahun 2021-2026	11
B Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
C Perencanaan Anggaran tahun 2023	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A Pengukuran Kinerja	22
B Realisasi Kinerja Anggaran	14
C Analisa Program/Kegiatan	24
Bab IV Penutup	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut	33

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	9
Tabel 1.2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.3 Rincian anggaran pada tahun 2023	14
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja 2023	14
Tabel 3.3 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022-2023	16
Tabel 3.4 Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023	16
Tabel 3.5 Tabel prosentase peningkatan PBB-P2	16
Tabel 3.6 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB Tahun 2022-2023	17
Tabel 3.7 Tabel Data Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2021-2023	18
Tabel 3.8 Tabel Prosentase Peningkatan BPHTB	18
Tabel 3.9 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Tahun 2022-2023	19
Tabel 3.10 Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023	20
Tabel 3.11 Tabel prosentase peningkatan Pajak Daerah Lain	20
Tabel 3.12 Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023	21
Tabel 3.13 Realisasi dari Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022	22
Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	23
Tabel 3.15 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	24
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran	31

Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi 2	
Grafik 3.1 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023	16
Grafik 3.2 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023	18
Grafik 3.3 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023	19
Grafik 3.4 Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2023. Kami memiliki dua sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tujuan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	5,00%	19,98%	100%	Sangat Baik
		2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	3,00%	33,10%	100%	Sangat Baik
		3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	2,97%	25,53%	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	83,25 (A)	84,79 (A)	101,85 %	Sangat Baik
		2. Nilai RB	36,3	34,17		
		3. Nilai SKM	93 (Sangat Baik)	92,15	99,09%	Sangat Baik
		4. Nilai IPP	4,28 (A-)	4,28 (A)	100,00 %	Sangat Baik

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah.

Melalui peraturan daerah diatas, maka Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi badan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Gambar Struktur Organisasi

Sumber data: Perbup SOTK Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 89 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Tabel 1.1

Data ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Exsisting
1	Kepala Badan	1	1
2	Administrator	4	4
3	Pengawas	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu Hasil Penyetaraan Jabatan	10	10
5	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Penyelia	1	1
6	Pelaksana	72	72

2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus

dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Potensi pajak daerah yang belum optimal tergali	1. Masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah 2. Mekanisme menghitung pajak sendiri (MPS) memungkinkan adanya wajib pajak yang kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usaha	1. Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak 2. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak
2	Masih tingginya Piutang pajak Kabupaten Sidoarjo	Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya, perubahan objek pajak fasum, fasos	1. Belum adanya perubahan regulasi penghapusan piutang pajak 2. Belum adanya pengkategorian Permasalahan piutang pajak beserta tindak lanjutnya

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak;

2. Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak;
3. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kemampuan Wajib pajak dalam membayar pajak;
4. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Misi 1 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan dan Tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha.**

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	21,80%	2,72%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%
			2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	10,91%	16,80%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%
			3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	8,25%	-1,27%	2,97%	3,49%	3,51%	3,53%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	82,96 (A)	83,25 (A)	83,25 (A)	83,26 (A)	83,26 (A)	83,27 (A)	
		2. Nilai RB	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	
		3. Nilai SKM	92,00 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)	93,00 (Sangat Baik)	93,50 (Sangat Baik)	94,00 (Sangat Baik)	94,50 (Sangat Baik)	
		4. Nilai IPP	4,25 (A-)	4,27 (A-)	4,28 (A-)	4,28 (A-)	4,29 (A-)	4,29 (A-)	

B Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Penerimaan Pajak Daerah	Rp1.130.000.000.000,00
		Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2	0,29 %
		Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	8,43%
		Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	7,25%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai SAKIP	83,25 (A)
		b. Nilai RB	36,3
		c. Nilai IPP	A
		d. Nilai SKM	Sangat Baik

Sumber Data: website e-Kinerja 2023

C Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp57.358.328.018 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp59.022.404.426 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2. 3
Rincian anggaran pada tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN
----	--------	----------	--------------------

1	Pendapatan Pajak Daerah	1.130.000.000	1.215.000.000.000,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.989.009.545	46.907.854.764,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	861.000.000	861.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.626.470.388	35.099.535.326,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.564.175	27.082.655,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.187.039.812	2.921.482.537,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.615.537	29.523.637,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.000.018	523.000.018,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.000.000	829.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.317.600	160.329.488,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	893.305.615	902.305.615,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.303.696.400	4.359.495.488,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	70.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.000.000	235.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.000.000	172.100.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	335.000.000	410.000.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.369.318.473	12.114.549.662,00
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	4.500.000	257.700.000,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	260.056.624	260.056.624,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.036.328.300	1.036.328.300,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.000.000	50.000.000,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		10.839.000,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	890.000.000	1.040.000.000,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	324.690.675	612.775.648,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		6.685.241,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.182.425	60.432.425,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	248.100.000	248.100.000,00
	Penagihan Pajak Daerah	6.918.800.000	7.744.031.800,00
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4.182.425	10.122.600,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	557.550.000	693.550.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.928.024	46.928.024,00
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	25.000.000	37.000.000,00
	TOTAL ANGGARAN	57.358.328.018	59.022.404.426,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
-----	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------	-----------------------	--

1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima (dalam persen)	1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	5,00	19,98%	400%	6,00%	333%
		2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	3,00	33,10%	1103%	4,00%	828%
		3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	2,97	25,53%	860%	3,53%	722%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	83,25	84,79	101,85 %	83,27	102%
		2. Nilai RB	36,3	34,17	94,13 %	36,3	94%
		3. Nilai SKM	93	92,15	99,09 %	94,5	98%
		4. Nilai IPP	4,28	4,28	100,00 %	4,29	100%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

1. Sasaran 1: Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Prima

a) Indikator 1 : Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2

No.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
-----	--------	-----------	-------------	-----------------------	--

1	5%	19,98%	400%	6%	333%
---	----	--------	------	----	------

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 dengan realisasi 19,98% dari target, dengan persentase 400%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 6%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai dengan capaian sebesar 333%. Perlu disampaikan bahwa target ini merupakan target Renstra 2021-2026, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target renstra. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel berikut:

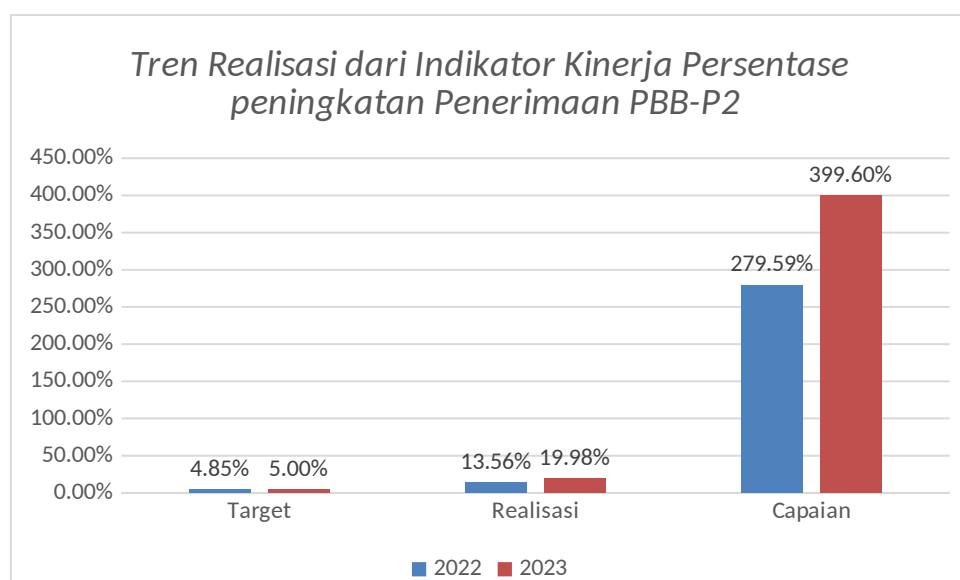
Tabel 3.3

Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022-2023

Tahun	2022	2023
Target	4,85%	5%
Realisasi	13,56%	19,98%
Capaian	279,59%	399,6%

Grafik 3. 1

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023



Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis pajak PBB-P2. Atas indikator ini diperoleh dari data penerimaan/realisasi PBB-P2 tahun 2023 dibandingkan dengan

penerimaan/realisasi PBB-P2 tahun 2021 (n-dasar). Dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023

URAIAN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PBB-P2	257.000.000.000,00	254.650.339.833,00	267.000.000.000	289.171.697.663	283.800.000.000	305.517.707.518,00

Tabel 3.5

Tabel prosentase peningkatan PBB-P2

URAIAN	2021	2022		2023	
	REALISASI	REALISASI	% PENINGKATAN	REALISASI	% PENINGKATAN
PBB-P2	254.650.339.833,00	289.171.697.663	13,56%	305.517.707.518,00	19,98%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 penerimaan PBB-P2 telah mengalami peningkatan yang cukup baik, prosentase peningkatan dari tahun 2022 atas 2021 sebesar 13,56%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun 2021 sebesar 19,98%, artinya ada kenaikan sebesar 6,42%. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak utamanya PBB-P2 diantaranya:

1. melakukan sosialisasi/pooling pembayaran PBB-P2 ke desa-desa dengan menggandeng BUMDes;
2. menerbitkan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;
3. melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait sistem informasi yang dapat diakses oleh perangkat desa perihal data realisasi pembayaran PBB-P2 secara *real-time*;
4. mengembangkan sistem informasi pajak daerah terkait virtual maps PBB-P2;

b) Indikator 2 : Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB

N o.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
------	--------	-----------	-------------	-----------------------	--

1	3,00	33,1	1103%	4,00%	828%
---	------	------	-------	-------	------

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB Tahun 2023 dengan realisasi 33,1% dari target, dengan persentase 1103%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai dengan capaian sebesar 828%. Perlu disampaikan bahwa target ini merupakan target Renstra 2021-2026, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target renstra. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel berikut:

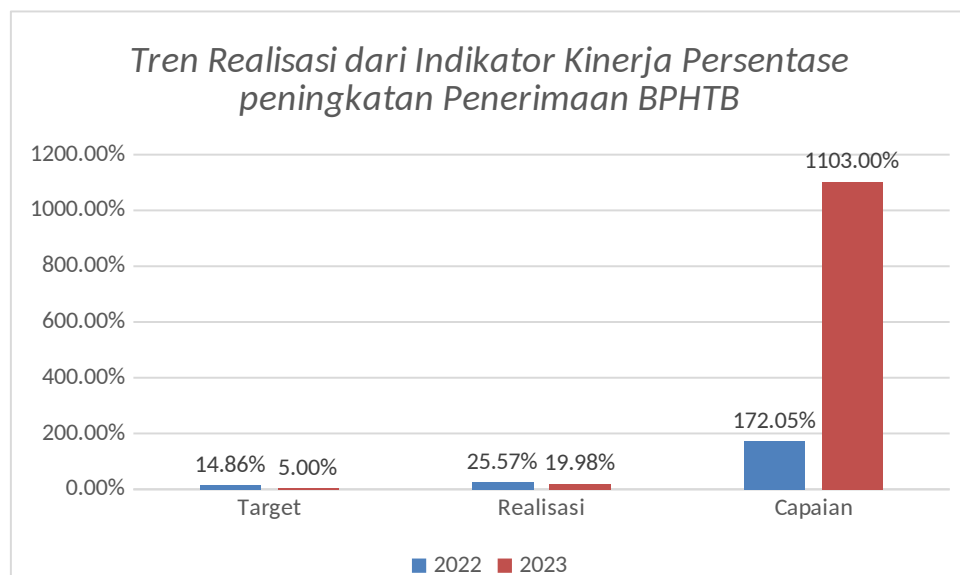
Tabel 3.6

Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB Tahun 2022-2023

Tahun	2022	2023
Target	4,85%	3%
Realisasi	13,56%	33,1%
Capaian	279,59%	399,6%

Grafik 3. 2

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023



Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis pajak BPHTB. Atas indikator ini diperoleh dari data penerimaan/realisasi BPHTB tahun 2023 dibandingkan dengan

penerimaan/realisasi BPHTB tahun 2021 (n-dasar). Dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tabel Data Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2021-2023

URAIAN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BPHTB	244.000.000.000,00	350.854.606.523,00	332.000.000.000	440.558.227.805	420.000.000.000	466.979.337.493,00

Tabel 3.8

Tabel prosentase peningkatan BPHTB

URAIAN	2021	2022		2023	
	REALISASI	REALISASI	% PENINGKATAN	REALISASI	% PENINGKATAN
BPHTB	350.854.606.523,00	440.558.227.805	25,57%	466.979.337.493,00	33,10%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 penerimaan BPHTB telah mengalami peningkatan yang cukup baik, prosentase peningkatan dari tahun 2022 atas 2021 sebesar 25,57%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun 2021 sebesar 33,10%, artinya ada kenaikan sebesar 7,53%. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak utamanya BPHTB diantaranya:

1. Penguatan regulasi pajak daerah;
2. Penguatan standar operasional prosedur;
3. Mengembangkan digitasi pelayanan pajak daerah;
4. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan unsur-unsur terkait lainnya.

c) Indikator 3 : Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

N o.	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	2,97%	25,53%	860%	3,53%	722%

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Tahun 2023 dengan realisasi 25,53% dari target, dengan persentase 860%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 3,53%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai dengan capaian sebesar 722%. Perlu disampaikan bahwa target ini merupakan target Renstra 2021-2026, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target renstra. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9

Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Tahun 2022-2023

Tahun	2022	2023
Target	11,05%	2,97%
Realisasi	14,98%	25,53%
Capaian	135,79%	860%

Grafik 3.3

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2022 - 2023



Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Daerah Lainnya. Atas indikator ini diperoleh dari data penerimaan/realisasi Pajak Daerah Lainnya tahun 2023 dibandingkan dengan penerimaan/realisasi Pajak Daerah Lainnya tahun 2021 (n-dasar). Dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 3.10

Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023

URAIAN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PBB-P2	257.000.000.000,00	254.650.339.833,00	267.000.000.000	289.171.697.663	283.800.000.000	305.517.707.518,00

Tabel 3.11

Tabel prosentase peningkatan Pajak Daerah Lain

URAIAN	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hasil Pajak Daerah	953.962.000.000,00	1.027.822.704.720,00	1.068.000.000.000	1.215.303.165.454	1.215.000.000.000	1.302.626.605.440,26
PAJAK HOTEL	10.792.000.000,00	14.080.874.501,00	17.500.000.000	19.993.670.874	20.000.000.000	21.795.275.752,00
PAJAK RESTORAN	63.000.000.000,00	63.518.290.481,00	82.500.000.000	89.623.187.239	95.000.000.000	112.818.170.066,10
PAJAK HIBURAN	2.800.000.000,00	1.201.039.009,00	5.500.000.000	6.359.422.711	7.000.000.000	7.738.499.404,00
PAJAK REKLAME	14.000.000.000,00	14.593.286.453,00	15.000.000.000	15.903.462.071	16.000.000.000	18.203.375.196,00
PAJAK PENERANGAN JALAN	344.000.000.000,00	313.967.752.550,00	330.500.000.000	332.411.739.624	350.000.000.000	342.977.025.636,16
PAJAK PARKIR	16.000.000.000,00	11.788.834.175,00	15.000.000.000	17.980.663.027	20.000.000.000	22.545.794.307,00
PAJAK AIR TANAH	2.370.000.000,00	3.167.681.195,00	3.000.000.000	3.301.094.440	3.200.000.000	4.051.420.068,00

URAIAN	2021	2022		2023	
	REALISASI	REALISASI	% PENINGKATAN	REALISASI	% PENINGKATAN
PAJAK DAERAH LAIN	419.150.077.169,00	485.573.239.986	15,85%	530.129.560.429,26	26,48%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 penerimaan PDL telah mengalami peningkatan yang cukup baik, prosentase peningkatan dari tahun 2022 atas 2021 sebesar 15,85%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun 2021 sebesar 26,48%, artinya ada kenaikan sebesar 10,63%. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak utamanya Pajak Daerah Lainnya diantaranya:

1. melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran, hotel, dan lainnya;
2. melakukan pemasangan alat tax monitor kepada wajib pajak restoran, hotel;
3. melakukan pengembangan layanan pajak daerah secara digital;
4. penguatan regulasi pajak daerah;
5. penguatan standar operasional prosedur.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	84,79 (A)	101,85 %	83,27 (A)	101,83%
		2. Nilai RB	34,17	94,13%	36,3	
		3. Nilai SKM	92,15	99,09%	94,50	97,51%
		4. Nilai IPP	4,28 (A)	100,00 %	4,29 (A)	99,77%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,25	84,79	101,8%
	Nilai RB	36,3	34,17	94,1%
	Nilai IPP	4,28	4,28	100,0%
	Nilai SKM	93	92,15	99,1%
Capaian Keluaran				98,7%

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan realisasi 98,7%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami penurunan sebesar 0,2%

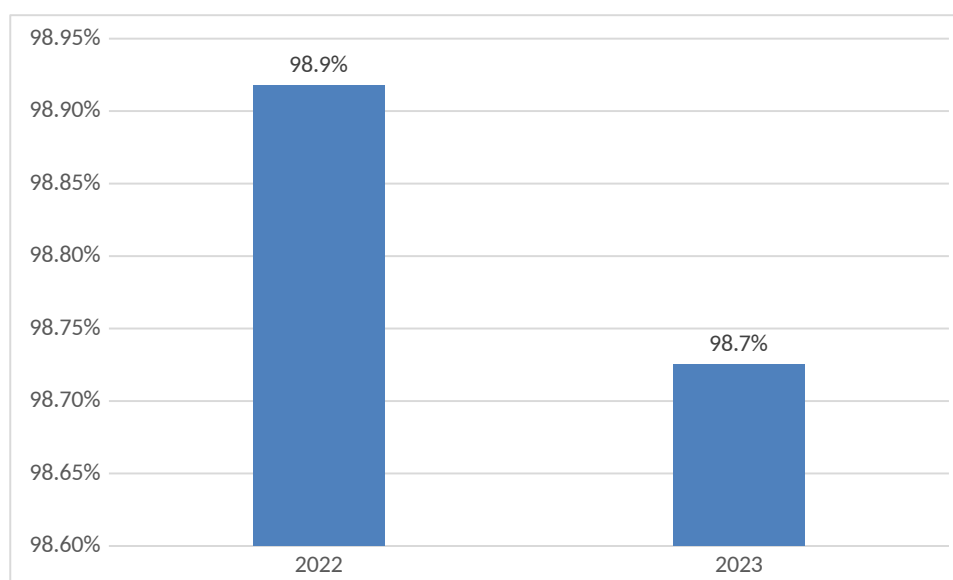
Tabel 3.12

Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023

Tahun	2022	2023
Capaian	98,92%	98,7%

Grafik 3.4

Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023



Selanjutnya dari data diatas dilakukan Analisa penyebab kegagalan menurunnya Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,25	83,25	100,00 %
	Nilai RB	36,3	34,17	94,13 %
	Nilai IPP	4,27	4,27	100,00 %
	Nilai SKM	92,5	94,08	101,71 %

Bila dilihat dari data target dan realisasi sasaran kedua ini tahun 2022 ini dapat dilihat bahwa nilai SKM turun realisasinya dari tahun 2023 sebesar 1,93. Nilai SKM adalah pengukuran secara komprehensi kegiatan terkait tingkat kepuasan masyarakat atas informasi dan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan Upaya peningkatan diantaranya:

- a. perbaikan sarana dan prasarana publik;
- b. penguatan SOP;
- c. penguatan regulasi pajak daerah;

B Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Tabel 3.14

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% kinerja	TARGET	REALISASI	% ANGGARAN	
				a	b	c		$\frac{(a*b)-c}{(a*b)*100\%}$
Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	5,00%	19,98%	399,60%	8.434.764.114	6.766.259.270	80,22%	79,93%
	Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	3,00%	33,10%	1103,33%	2.381.478.924	2.281.654.925	95,81%	91,32%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	2,97%	25,53%	859,60%	1.298.306.624	1.018.828.044	78,47%	90,87%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, Nilai SKM			98,7%	46.907.854.764	43.105.009.006	91,89%	6,90%

Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\frac{\prod_{j=1}^n \text{Realisasi Indikator}_j}{\prod_{j=1}^n \text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (Output) Program

m : Jumlah Keluaran (Output) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (Output) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut.

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:

- Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 dengan tingkat efisiensi sebesar 79,93% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - melakukan sosialisasi/pooling pembayaran PBB-P2 ke desa-desa dengan menggandeng BUMDes;
 - menerbitkan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;
 - melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait sistem informasi yang dapat diakses oleh perangkat desa perihal data realisasi pembayaran PBB-P2 secara *real-time*;
 - mengembangkan sistem informasi pajak daerah terkait virtual maps PBB-P2;
- Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB dengan tingkat efisiensi sebesar 91,32% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Penguatan regulasi pajak daerah;
 - Penguatan standar operasional prosedur;
 - Mengembangkan digitasi pelayanan pajak daerah;
 - Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan unsur-unsur terkait lainnya.
- Indikator Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain dengan tingkat efisiensi sebesar 90,87% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran, hotel, dan lainnya;
 - melakukan pemasangan alat tax monitor kepada wajib pajak restoran, hotel;
 - melakukan pengembangan layanan pajak daerah secara digital;
 - penguatan regulasi pajak daerah;
 - penguatan standar operasional prosedur.
- Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 6,90% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - perbaikan sarana dan prasarana publik;
 - penguatan SOP;
 - penguatan regulasi pajak daerah;

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

C Analisa Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Tabel 3.15

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
					Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101,80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 46.907.854.764	Rp 43.105.009.006	91.89 %	
		Nilai RB	94,10%					
		Nilai IPP	100,00%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 861.000.000	Rp 752.029.350	87.34 %
		Nilai SKM	99,10%					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 861.000.000	Rp 752.029.350	87.34 %
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 35.099.535.326	Rp 32.031.687.399	91.26 %
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 35.099.535.326	Rp 32.031.687.399	91.26 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.809.088.847	Rp 3.670.216.281	96.35 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 27.082.655	Rp 26.720.000	98.66 %		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.921.482.53	Rp 2.805.326.70	96.02 %		

						7	5	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 300.000.000	Rp 298.050.000	99.35 %
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 29.523.637	Rp 28.900.900	97.89 %
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8.000.000	Rp 7.850.000	98.13 %
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 523.000.018	Rp 503.368.676	96.25 %
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 829.000.000	Rp 824.440.500	99.45 %
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 829.000.000	Rp 824.440.500	99.45 %
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.422.130.591	Rp 5.058.299.816	93.29 %
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 160.329.488	Rp 157.807.951	98.43 %
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 902.305.615	Rp 865.205.987	95.89 %

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.359.495.488	Rp 4.035.285.878	92.56 %
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 887.100.000	Rp 768.335.660	86.61 %
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 70.000.000	Rp 58.706.265	83.87 %
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 235.000.000	Rp 208.683.495	88.80 %
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 172.100.000	Rp 170.563.150	99.11 %
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 410.000.000	Rp 330.382.750	80.58 %
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	400%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rp 12.114.549.662	Rp 10.066.742.239	83.10 %
		Persentase Peningkatan Penerimaan	1103%					

		BPHTB					
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	860%				
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp 12.114.549.662	Rp 10.066.742.239	83.10 %
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 257.700.000	Rp 253.651.800	98.43 %
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 260.056.624	Rp 218.051.200	83.85 %
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1.036.328.300	Rp 985.031.570	95.05 %
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 50.000.000	Rp 49.612.400	99.22 %
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 10.839.000	Rp 10.650.000	98.26 %
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Rp 1.040.000.00	Rp 997.777.855	95.94 %

					Pajak Daerah	0		
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 612.775.648	Rp 596.450.250	97.34 %
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 6.685.241	Rp 6.584.000	98.49 %
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 60.432.425	Rp 17.654.650	29.21 %
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 248.100.000	Rp 245.962.500	99.14 %
					Penagihan Pajak Daerah	Rp 7.744.031.80 0	Rp 6.134.920.37 0	79.22 %
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 10.122.600	Rp 9.666.000	95.49 %
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 693.550.000	Rp 462.316.500	66.66 %
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 46.928.024	Rp 43.217.000	92.09 %
					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp 37.000.000	Rp 35.196.144	95.12 %

| |

|

|

|

--	--	--	--

3) Realisasi Anggaran

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Pajak Daerah	1.215.000.000.000,00	1.302.626.605.440,26	107,21%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.907.854.764,00	43.105.009.006,00	91,89%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	861.000.000,00	752.029.350,00	87,34%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.099.535.326,00	32.031.687.399,00	91,26%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.082.655,00	26.720.000,00	98,66%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.921.482.537,00	2.805.326.705,00	96,02%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	298.050.000,00	99,35%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.523.637,00	28.900.900,00	97,89%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	7.850.000,00	98,13%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.000.018,00	503.368.676,00	96,25%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	829.000.000,00	824.440.500,00	99,45%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.329.488,00	157.807.951,00	98,43%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	902.305.615,00	865.205.987,00	95,89%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.359.495.488,00	4.035.285.878,00	92,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000,00	58.706.265,00	83,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.000.000,00	208.683.495,00	88,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.100.000,00	170.563.150,00	99,11%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000,00	330.382.750,00	80,58%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.114.549.662,00	10.066.742.239,00	83,10%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	257.700.000,00	253.651.800,00	98,43%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	260.056.624,00	218.051.200,00	83,85%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.036.328.300,00	985.031.570,00	95,05%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.000.000,00	49.612.400,00	99,22%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10.839.000,00	10.650.000,00	98,26%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.040.000.000,00	997.777.855,00	95,94%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	612.775.648,00	596.450.250,00	97,34%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	6.685.241,00	6.584.000,00	98,49%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak	60.432.425,00	17.654.650,00	29,21%

Daerah			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	248.100.000,00	245.962.500,00	99,14%
Penagihan Pajak Daerah	7.744.031.800,00	6.134.920.370,00	79,22%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.122.600,00	9.666.000,00	95,49%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	693.550.000,00	462.316.500,00	66,66%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	46.928.024,00	43.217.000,00	92,09%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	37.000.000,00	35.196.144,00	95,12%
Jumlah	59.022.404.426,00	53.171.751.245,00	90,09%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 pada dua sasaran strategis yakni Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dikategorikan Sangat Berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tidak adanya regulasi terkait penggunaan Bagi Hasil Pajak didalam pemungutan pajak daerah oleh desa;
2. Keterlambatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2 oleh pemungut PBB tingkat desa/kelurahan ke Wajib Pajak;
3. Belum adanya petugas tingkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi penerimaan PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2 menggunakan aplikasi SIE Pajak Daerah terkait dengan tunggakan wajib pajak PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2 (pengganti DHKP);
4. Adanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang sesungguhnya atau seharusnya;

4.2 Pemecahan Masalah/Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo untuk pengalokasian sebesar 15% dari Bagi Hasil Pajak untuk mendukung pemungutan pajak daerah oleh desa;
2. Sosialisasi Cetak mandiri SPPT PBB-P2 menggunakan dokumen SPPT PBB-P2, aplikasi, website, dan media lainnya;

3. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi terhadap wajib pajak sebagai monitoring atas omzet;
4. Melakukan penelitian kesesuaian pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak ataupun dengan alat perekam transaksi;

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

3/1/23, 2:06 PM

<https://e-kinerja.sidoarjokab.go.id/cetak-pk/15319/2023/0/2023-01-26>



PERJANJIAN KINERJA 2023

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI SURYONO., S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : **H. AHMAD MUHDOR, S.IP**
Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
197502131993111001

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
197502131993111001

<https://e-kinerja.sidoarjokab.go.id/cetak-pk/15319/2023/0/2023-01-26>

1/3



PERJANJIAN KINERJA 2023
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Penerimaan Pajak Daerah	Rp1.130.000.000.000,00
		Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2	0,29 %
		Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	0,43%
		Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	7,25%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai SAKIP	83,25 (A)
		b. Nilai RB	36,3
		c. Nilai IPP	A
		d. Nilai SKM	Sangat Baik

JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 10.309.315.473	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 46.909.009.040	
JUMLAH		Rp. 57.358.328.016	

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si
 197502131993111001

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 197502131993111001



PAKTA INTEGRITAS
KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **ARI SURYONO, S.Sos, M.Si, KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH** menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesucilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si
197502131993111001

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
197502131993111001

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO					
<p>Tugas Jabatan : Menampung, mengkoordinasi, koordine dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.</p> <p>Fungsi Jabatan : 1. Perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kasakerjasama; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan; 4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; 5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Penyerahan Pajak Daerah</p> <p>Indikator Tujuan: Persentase Peningkatan Pajak Daerah</p>					
NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULAS/PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penyerahan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	1. Persentase Peningkatan Penyerahan Pajak Daerah Lain	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dengan situasi pelayanan yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah I

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULAS/PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase Peningkatan Penyerahan PPh-P2	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak PPh-P2 yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PPh-P2 dengan situasi pelayanan yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah II
		3. Persentase Peningkatan Penyerahan DPHTB	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak DPHTB yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak DPHTB dengan situasi pelayanan yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah II
		4. Penyerahan Pajak Daerah	Realisasi Penyerahan pajak daerah yang dapat diukur secara berkala dan tahunan	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Seluruh Bidang Pajak Daerah I, II dan III

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASIPENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana di maksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2012 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretaris Bidang Pajak Daerah UII dan II
		2. Nilai RB	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan meningkatkan produktivitas serta perbaikan kualitas sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan, organisasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur.	Hasil PMPRO	Sekretaris Bidang Pajak Daerah UII dan II

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASIPENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Nilai IPD	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Proliferasi/ruang SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Komitmen dan Pengakuan serta Aspek Inovasi.	Hasil Partisan IPD	Sekretaris
		4. Nilai SKM	Service Kuesioner Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengisian secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Hasil Perolehan Service Kuesioner Masyarakat	Sekretaris

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ABU SURYONO, S.Sos., M.Si.
Panglima Utama Muda
NIP. 8050213 100311 1 001

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023



RENCANA AKSI

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

PERIODE PENILAIAN : 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ARI SURYONO, S.Sos., M.Si	Nama	H. AHMAD MUHDOR, S.IP
NIP	197502131993111001	NIP	0
Pangkat / Gol.Ruang	IV/c / Pembina Utama Muda	Pangkat / Gol.Ruang	- / BUPATI
Jabatan	KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Jabatan	BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA	
1	Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dengan kualitas pelayanan prima
	Rencana Aksi : Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan PBB P2 Melaksanakan kegiatan Sosialisasi PBB-P2
2	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah Lainnya dengan kualitas pelayanan prima
	Rencana Aksi : Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan PDL Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
3	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
	Rencana Aksi : Menyediakan sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sesuai Menpun RB Nomor 66 Tahun 2020 Memberikan penghargaan kepada pegawai dan di-publish di ruang layanan atau website BPPD Melaksanakan monev atas hasil konsultasi dan pengaduan sebagai dasar penerapan kebijakan Mempublikasikan informasi non elektronik yang berisi informasi, motto pelayanan, banner BerAKHLAK, banner anti gratifikasi, dsb
4	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
	Rencana Aksi : Memonitoring pengisian LKE PMPRB mencapai kecukupan 90%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
	Rencana Aksi : Melaksanakan revaluasi renstra secara berkala Melakukan revaluasi IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD Melakukan revaluasi Dokumen Kinerja tahunan (LAKIP) secara berkala Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Akuntabilitas kinerja
6	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik
	Rencana Aksi : Melakukan monitoring dan evaluasi SKM BPPD Tahun 2024
7	Meningkatnya penerimaan Pajak BPHTB dengan kualitas pelayanan prima
	Rencana Aksi :

	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak BPHTB</p> <p>Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak BPHTB</p>	
8	Terlaksana peningkatan profesionalitas ASN	<p>Rencana Aksi :</p> <p>Mengikuti peningkatan kompetensi melalui Bintek, Webinar, dll</p>

BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARI SURYONO, S.Sos., M.Si
 197502131993111001

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

ARI SURYONO, S.Sos., M.Si

0

197502131993111001

D. **Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023**



Dokumentasi Penghargaan yang diterima

<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 188/23/438.1.1.3/2023 TANGGAL : 21 Desember 2023</p> <p>HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIDOAJI TAHUN 2023</p>				
Kategori Perangkat Daerah Penunjang (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)				
1.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	4,28	A-	Sangat Baik

p



TOP 3 CAPAIAN IPP KATEGORI PD PENUNJANG



RATA-RATA CAPAIAN IPP KATEGORI PD PENUNJANG = 3,96 



G. Matriks Renstra/ Renja

Misi Renja	Tipe Renja	Indikator Kinerja	Isi Renja	Indikator Kinerja	Tahun Renja	Target						Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Program (dikembangkan sesuai kebutuhan instansi)	2021		2022		2023		2024		2025		Rencana Awal	Rencana Akhir	Indikator Kinerja Utama																																																																																																																																																						
						2021	2022	2023	2024	2025	2021			2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																										
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan, Transparan dan Tanggung Jawab, Efektif dan Akuntabel, Mengutamakan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Pengembangan Pemasaran Pajak Daerah	Peningkatan Revisi Pajak Daerah	1. Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	1. Program Pemungutan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																						3. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																													
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																									4. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																												5. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																															6. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																		7. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																					8. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																								9. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
						2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																											10. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Target: 100% (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi/Target	Tipean (R)	Indikator Kinerja	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Tahun 2021	2021						Mulaikanya (awal)	Indikator Kinerja (Program Sub-Program) / Indikator (Indikator) / Sasaran (Indikator)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kategori (RUMAH SAKIT)	Indikator Kinerja (Program Sub-Program) / Indikator (Indikator) / Sasaran (Indikator)															
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
						Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target			Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target																	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Rasio Rata-Rata	1. Meningkatkan Rasio Rata-Rata (Rata-rata) dengan kualitas pelayanan prima	1. Persentase Sempurna Pelayanan PDS-01	-	11,8%	2,7%	5,9%	100%	100%	100%	1. Program Pemungutan dan Penertarikan Uang Mulaikanya	Tingkat kepuasan operator pengantar (Rata-rata) sebesar 90% (Rata-rata)	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%	90,0	90%							
				2. Persentase Sempurna Pelayanan PDS-02	-	10,7%	9,9%	9,9%	100%	100%	100%	1. Penilaian dan Pengukuran dan Sistem Kinerja Pengantar Dana	Jumlah layanan pelayanan yang dilaksanakan	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3. Persentase Sempurna Pelayanan PDS-03	-	9,3%	-1,2%	11,7%	11,8%	11,8%	11,8%	1. Jumlah Dokumen pelayanan yang dibuat	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4. Nilai NAKD	-	0,30 (1)	0,20 (2)	0,20 (2)	0,20 (2)	0,20 (2)	0,20 (2)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Nilai R3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Nilai NAKD (Target 0,20)	-	0,30 (Target 0,20)	0,20 (Target 0,20)	0,20 (Target 0,20)	0,20 (Target 0,20)	0,20 (Target 0,20)	0,20 (Target 0,20)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7. Nilai R3	-	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8. Nilai R3	-	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9. Nilai R3	-	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10. Nilai R3	-	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	0,1 (Target 0,1)	1. Jumlah Dokumen pelayanan dan pengantar yang	Jumlah dokumen pelayanan dan pengantar yang	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. LHE SAKIP Tahun n-1



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Nomor : 700/15317/438.4/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pel Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah men tim dengan surat tugas nomor : 700/2257/438.4/2023 tanggal 31 Agustus 202: melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan e ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang l Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kiner, pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result c government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyeleng pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Telp. (031) 8921946, 891145
E-mail : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Keterjabsai
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **84,79** atau predikat "**A**". *Penilaian tersebut menunjukkan Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memlmpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021-2026 telah disusun serta dilakukan reviu secara berkala dan menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perubahan yang telah ditetapkan pada 27 Juni 2023 serta dituangkan dalam berita acara beserta lampirannya yang menyajikan kondisi sebelum dan sesudah reviu.
- b. Dokumen Renstra telah diformalkan serta memuat tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya.
- c. Dokumen Renstra, Renja, dan PK telah dipublikasikan pada *website* OPD dan ESR.
- d. Dokumen PK telah disusun mulai tingkat eselon II sampai tingkat staf. Dokumen PK juga telah selaras dengan dokumen Renstra, baik dari indikator kinerja maupun targetnya.
- e. Dokumen Identifikasi Kebutuhan atas Barang untuk tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan.
- f. Rencana Aksi atas kinerja telah disusun. Namun terdapat sebagian rencana aksi yang tidak selaras dengan PK yang telah ditetapkan.
- g. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi/risk register atas kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program - program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Selain itu juga telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko dilengkapi

dengan target waktu dan penanggung jawab risiko yang telah ditetapkan sebagai bentuk mitigasi risiko OPD.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun. Data kinerja yang tertuang dalam IKU telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi, dan sumber data.
- b. Dokumen Evaluasi Internal berkala disampaikan setiap bulan telah disajikan lengkap mulai dari pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) s.d level staf atau individu. Dokumen Evaluasi Internal telah dilengkapi dengan data, Perjanjian Kinerja beserta uraian dan targetnya, Pemetaan Kinerja Tribulan beserta uraian dan targetnya, realisasi, capaian dan terdapat kendala, upaya perbaikan, serta tanggapan atasan langsung. Namun uraian pada Evaluasi internal tidak menjelaskan apakah merupakan sasaran atau indikator. Beberapa uraian menuliskan sasaran dan beberapa uraian lain menuliskan indikator. Pada beberapa uraian capaian pada evaluasi internal yang tidak/belum tercapai, tidak diuraikan sebabnya.
- c. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada dan dapat diandalkan.
- d. Telah terdapat SK sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment*, implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana SK dasar pemberian *Reward and Punishment*. Pada 2023 telah terdapat berita acara keputusan pemberian *Reward and Punishment* namun pada berita acara tersebut tidak menyebutkan capaian apa yang telah diraih oleh pegawai yang memperoleh *reward*.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2022 telah disusun.
- b. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik.
- c. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan kegiatan.
- d. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan data secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab

keberhasilan atau pemicu atas pencapaian efisiensinya juga telah disajikan secara sederhana.

- e. Keberhasilan atas efisiensi yang telah dicapai juga telah disajikan secara komprehensif baik analisa penjelasannya maupun upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Hasil evaluasi internal pada tiap-tiap tingkatan mulai eselon sampai dengan staf juga telah dilakukan analisa apakah menunjukkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian kinerjanya dengan mencantumkan simpulan, rekomendasi atasan dan tindak lanjut atau rencana upaya perbaikan kinerja ke depan.
- b. Pelaksanaan Evaluasi Internal atas program/kegiatan telah dilaksanakan secara periodik, baik tingkat eselon maupun tingkat staf.
- c. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh SDM yang memadai telah optimal.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko dilingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Senantiasa melaksanakan reuiu Renstra secara berkala untuk menyelaraskan setiap perubahan sesuai dengan kondisi yang ada, dan melengkapi pelaksanaan reuiu Renstra dengan dokumen SOP mekanisme reuiu Renstra disertai jadwal reuiu, laporan hasil reuiu, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas dan data kinerjanya dapat diandalkan.
- b. Senantiasa memastikan indikator kinerja pada Renstra, Renja, PK, Renaksi tetap dalam kriteria SMART dan selaras.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Untuk selanjutnya agar memastikan *Reward and Punishment* telah dilaksanakan sebagaimana SK yang telah disusun. Serta senantiasa memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian

Reward and Punishment bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal.

- b. Untuk selanjutnya agar evaluasi internal yang disusun telah selaras dengan PK maupun renaksi, serta melengkapinya dengan sebab belum/tidak tercapainya target.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Senantiasa melakukan revidu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD dalam rangka *quality assurance* penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal.
- b. Senantiasa mempertahankan kinerja yang telah mencapai target bahkan capaiannya diatas ekspektasi dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi dalam rangka pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Senantiasa menyempurnakan Evaluasi Internal berkala selanjutnya dengan menyajikan simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi ke depan.
- b. Senantiasa memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal, agar dapat menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi dengan baik, Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal, serta memanfaatkan Hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

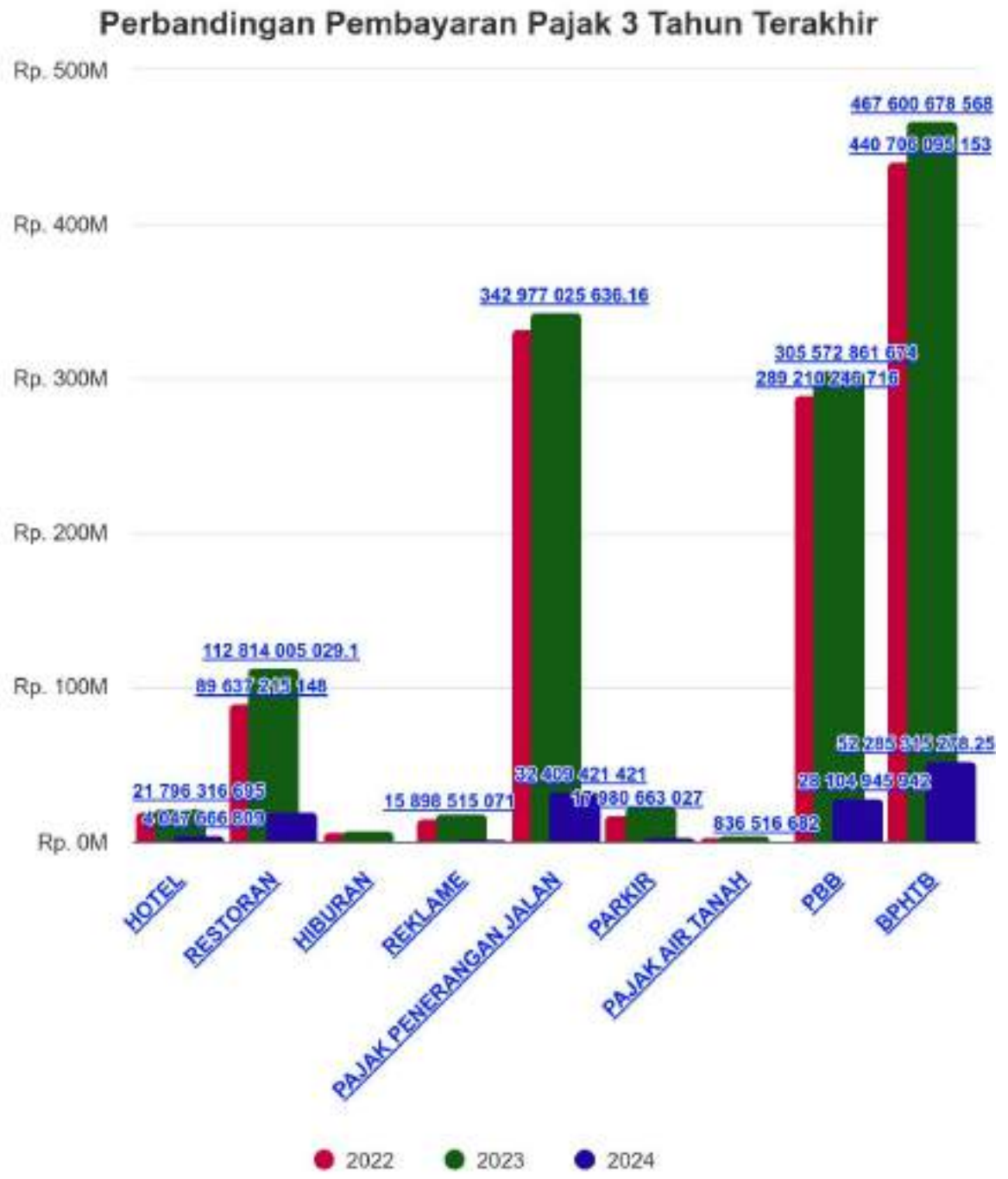


Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur
Up. Inspektur Provinsi Jawa Timur
di Sidoarjo

I. **Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja**

The screenshot shows a web-based financial reporting system. The interface includes a navigation menu on the left and a main data table. The table contains multiple columns, likely representing different fiscal years or categories, and rows listing various items or transactions. The data is presented in a structured grid format.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187
SIDOARJO - 61218

Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 09 Desember 2023

Kepada

Nomor : 700/3548/438 . 4/2023

Yth Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sifat : Penting

Kabupaten Sidoarjo

Lampiran: -

di

Perihal : Penyampaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun
2023

SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di OPD Saudara.

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat kami sampaikan bahwa nilai AKIP pada OPD Saudara adalah sebesar **84,79** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Adapun hasil secara rinci atas evaluasi dimaksud akan kami sampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang akan kami kirimkan menyusul.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik melalui

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP.127009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.127009261990031005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

